

LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN PENGGUNAAN BAHASA PADA MEDIA LUAR RUANG
DI KABUPATEN SUMBAWA



Disusun oleh:
I Nyoman Cahyasabudhi Santosa
Lukmanul Hakim

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN PENGGUNAAN BAHASA MEDIA LUAR RUANG
DI KABUPATEN SUMBAWA**

Disusun oleh

**I Nyoman Cahyasabudhi Santosa
Lukmanul Hakim**

Laporan penelitian ini telah diperiksa dan disahkan oleh
**Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
Mataram, September 2019**

**Umi Kulsum, M.Hum
NIP 197301161997032001**

DAFTAR ISI

Sampul Depan

Halaman Pengesahaan i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Abstrak iv

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan 4

1.4 Manfaat 4

1.5 Kajian Pustaka 4

1.6 Kajian Teori 8

1.6.1 Teori Pengutamakan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik 8

1.6.2 Fisik Kebahasaan 9

1.6.3 Tipografi Kebahasaan 10

1.7 Metode Penelitian 16

1.7.1 Populasi dan Sampel 16

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 18

1.7.3 Metode Analisis Data 19

BAB II Gambaran Umum 21

2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Sumbawa 21

2.2 Penduduk 22

BAB III Hasil dan Pembahasan 23

3.1 Deskripsi Hasil Penilaian Pemantauan Media Luar Ruang 23

3.1.2 Deskripsi Peringkat Keterkendalian 23

3.2 Pembahasan 29

3.3 Kendala 32

BAB IV Penutup 33

4.1 Simpulan 33

4.2 Saran 34

Daftar Pustaka 35

Lampiran-lampiran

ABSTRAK

Kajian penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang merupakan tugas dan fungsi Kantor Bahasa NTB untuk mengkaji sejauh mana penggunaan bahasa negara di ruang public. Kajian ini digunakan sebagai acuan atau tolok ukur dalam menentukan kebijakan pemakaian bahasa sehingga kebijakan tersebut dapat berpihak pada langkah pemertabatan bahasa Indonesia.

Data yang digunakan dalam kajian ini berupa papan nama gedung, jalan, perkantoran perkantoran, lembaga usaha, lembaga pendidikan organisasi atau badan hukum. Data diperoleh dengan memfoto media luar ruang yang kemudian ditranskripsi dan dianalisis. Model analisis yang digunakan adalah analisis kebahasaan berupa instrument penilaian yang menggunakan tiga variabel a. kaidah kebahasaan meliputi ejaan, pilihan kata, dan struktur; b. fisik kebahasaan; posisi, ukuran huruf, dan warna huruf; dan c. tipografi kebahasaan; desain, dan kejelasan

Hasil kegiatan pemantauan menunjukkan penggunaan bahasa pada ranah ruang publik menunjukkan terkendali A untuk Kabupaten Sumbawa.

Kata kunci: *ruang publik, pemantauan, dan pengendalian.*

KATA PENGANTAR

Penggunaan Bahasa di ruang publik di wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang asal-asalan di beberapa tempat khususnya di ruang-ruang publik tempat banyaknya masyarakat berkumpul. Keprihatinan tersebut diperparah lagi dengan desakan bahasa asing. Bahasa asing tampaknya semakin populer digunakan sebagai bahasa tulis baik itu pada papan informasi maupun promosi.

Undang undang RI No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan sudah sangat jelas mengatakan bahwa bahasa Indonesia haruslah diutamakan. Tujuan utamanya adalah penguatan Bahasa Indonesia khususnya di ruang publik. Kita tidak anti bahasa asing. Namun, sebagai salah satu pilar kokohnya bangsa Indonesia maka jelaslah bahasa Indonesia harus lebih bermartabat dan posisinya haruslah di atas bahasa asing jika ditilik dari segi penulisannya.

Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat sebagai ujung tombak pengutamaan bahasa Indonesia di daerah merasa perlu melakukan pemantauan terhadap bahasa di ruang publik di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini diharapkan mampu mengendalikan dan mengatur penggunaan bahasa di ruang publik sehingga bahasa Indonesia tetap bermartabat di negeri sendiri.

Mataram, Oktober 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unit kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud di daerah adalah melakukan kajian penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang. Kajian tersebut dimaksudkan guna melakukan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat untuk mengkaji sejauh mana pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai salah satu amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pada Bab III Bahasa Negara pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia; ayat (4) menyebutkan bahwa penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan. Lebih jauh, pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum dan ayat (2) menyebutkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Pada Bab III bagian kedua tentang penggunaan bahasa Indonesia pasal 26 dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan; kemudian pada pasal 27 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara; dan pasal 34 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perorangan kepada instansi pemerintah.

Beberapa daerah yang menjadi daerah pengamatan seperti Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat memperlihatkan fenomena media luar ruang yang begitu beragam terutama di

pusat-pusat kota di mana terdapat berbagai instansi-instansi baik negeri maupun swasta di daerah.. Masyarakat tidak hanya disuguhkan dengan berbagai macam barang dan tempat berbelanja tetapi juga disuguhkan dengan berbagai informasi yang disampaikan melalui papan nama, reklame, spanduk, dan berbagai jenis media luar ruang lainnya. Tidak sedikit informasi yang disampaikan tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia bahkan disampaikan dalam bahasa asing dan daerah. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, penggunaan bahasa asing ataupun bahasa daerah tidak dilarang pada penulisan papan nama, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, reklame, dan spanduk tetapi harus mengutamakan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, penulisannya menggunakan bahasa Indonesia dan dapat diikuti oleh bahasa asing dan bahasa daerah.

Pengaturan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lingua franca bagi berbagai etnis dengan bahasa yang berbeda di Indonesia tidak lain karena ruang publik (*public space*) bukanlah ruang privat melainkan ruang yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan arena bagi masyarakat untuk berinteraksi (Jurgen Habermas dalam Kadarsh, 2008: 1). Ruang publik tidak membatasi siapa yang dapat mengunjunginya sehingga siapa saja dapat menikmati fasilitas umum yang ada tersebut. Ruang publik tidak memberikan akses kepada etnis tertentu, tetapi memberikan keluasan bagi siapa saja yang mau menikmati fasilitas yang ada di sana. Ruang publik merupakan tempat interaksi yang bersifat umum.

Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lingua franca bagi etnis dengan bahasa yang berbeda wajib hadir dan diutamakan karena hanya bahasa Indonesia yang secara hukum diakui dan dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ada tiga hal yang menjadi pusat perhatian pengutamaan bahasa negara di ruang publik, fisik kebahasaan meliputi kaidah kebahasaan, fisik kebahasaan dan tipografi kebahasaan.

Berkaitan dengan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan tersebut sebagai wujud pelaksanaan amanat

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta

Lagu Kebangsaan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas yang menjadi masalah topik kajian dalam penelitian penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Kabupaten Sumbawa adalah:

1. Bagaimanakah pengutamakan penggunaan bahasa negara di ruang publik di Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimanakah bentuk penggunaan bahasa Negara di ruang publik di Kabupaten Sumbawa?

1.3 Tujuan

Tujuan kajian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui pengutamakan penggunaan bahasa negara di ruang publik di Kabupaten Sumbawa.
- 2). Untuk mengetahui bentuk penggunaan bahasa negara di ruang publik di Kabupaten Sumbawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dalam kajian pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, di Kabupaten Sumbawa.

Manfaat lain kajian ini diharapkan sebagai pengembangan bahan penelitian selanjutnya bagi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat dan peneliti lanjutan dalam kajian pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan bentuk penggunaan bahasa negara di ruang public di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengutamakan Bahasa Indonesia di ruang publik

1.5 Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap penggunaan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik pernah dilakukan oleh para peneliti atau akademisi. Kajian-kajian tersebut juga telah dipublikasikan pada jurnal ataupun seminar-seminar. Beberapa kajian yang dimaksud secara ringkas disampaikan dalam penelitian ini sebagai referensi dan pijakan berpikir.

Kajian tersebut antara lain dilakukan Sri Indrawati (2008) dengan judul “Penggunaan Bahasa Indonesia pada Informasi Layanan Umum dan Layanan Niaga, Sudah Benarkah?”; Ratna Susanti dengan judul “Analisis Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Media Luar Ruang di Kota Klaten”; Noviandy (2014) dengan judul “Persepsi Masyarakat tentang Penggunaan Iklan Memdia Luar Ruang terhadap Estetika Kota Samarinda”; kajian pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Surakarta yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2012); dan pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat (2007-2008).

Indrawati (2008:3) menjelaskan bahwa konsekuensi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media luar dapat menimbulkan konsekuensi bagi para pemakai bahasa dan kegamaan perkembangan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang. Dalam kajiannya, Indrawati menemukan penulisan menggunakan bahasa daerah dan asing serta kesalahan penulisan.

Kajian yang dilakukan oleh Susanti menemukan masih banyaknya kesalahan penulisan bahasa di media luar ruang di Kota Klaten. Kesalahan yang dimaksud adalah belum atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia juga memberikan contoh kesalahan yang ditemukan, yaitu penulisan tanda baca, penulisan singkatan, kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan pemilihan kata, dan kesalahan ejaan.

Noviandy (2014: 417) melakukan kajian persepsi masyarakat Kota Samarinda terhadap penggunaan iklan di media luar ruang. Noviandy (2014: 429) menemukan bahwa masyarakat Kota Samarinda tidak menyukai kondisi iklan media luar ruang dan tidak menyukai ketidateraturan penggunaan media luar ruang karena dapat merusak pemandangan.

Pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Surakarta yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menemukan adanya penulisan nama jalan menggunakan aksara Jawa termasuk nama perusahaan; penggunaan bahasa asing pada papan nama; penulisan ejaan yang tidak tepat. Pemantauan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Tim Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat menemukan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada tataran ejaan, penggunaan tanda baca, dan struktur tulisan yang dipengaruhi oleh bahasa asing dan daerah.

Dengan kata lain, penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang masih tidak mengikuti aturan sesuai dengan norma yang dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2009. Kesalahan-kesalahan yang dimaksud mencakup penulisan menggunakan bahasa asing dan daerah, kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, dan struktur yang dipengaruhi oleh bahasa asing dan daerah.

Penelitian terkait yang pernah dibiayai oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat dilakukan oleh Husnan dkk. 2017. Dengan topik kajian dalam penelitian “Peguna bahasa Indonesia di media luar ruang dan dokumen resmi daerah di Nusa Tenggara Barat.” Adapun hasil kajian tersebut yaitu sikap bahasa pengusaha atau pelaku bisnis dan kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang yang menunjukkan hasil yang memuaskan. Penggunaan bahasa di dua ranah pada masing-masing daerah masuk dalam kelompok sangat baik. Meskipun begitu, Kota Bima menduduki peringkat teratas diikuti oleh Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat.

Sasaran utama kajian penggunaan dan pengutamaan bahasa negara di ruang publik di Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

1) Tulisan nama lembaga dan gedung, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama lembaga berbadan hukum Indonesia dan nama gedung utama yang terpampang di ruang publik.

2) Tulisan nama sarana umum, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada sarana (tempat parkir, ruang tunggu, kantin, dan lain-lain) yang dapat dipakai oleh masyarakat umum yang ikut serta melaksanakan fungsi lembaga.

3) Tulisan nama ruang pertemuan, objek ini merupakan bahasa yang digunakan dalam penamaan tempat pertemuan yang bersifat umum (nama aula, nama ruang rapat, balai sidang, dan lain-lain).

4) Tulisan nama produk barang/jasa, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk produk barang/jasa khas yang dihasilkan lembaga (nama jasaboga, bahan publikasi, nama laman, buku, dan lain-lain).

5) Tulisan nama jabatan, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk jabatan yang tercantum pada tempat atau ruangan kantor lembaga (tulisan jabatan pada meja atau ruangan pimpinan lembaga, dan lain-lain).

6) Tulisan penunjuk arah atau rambu umum, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada tulisan untuk mengarahkan publik menuju tempat tertentu atau melakukan sesuatu (tulisan masuk, keluar, dilarang parkir, dan lain-lain).

7) Tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada spanduk, kain rentang, slogan, imbauan, moto, atau informasi lain yang diketahui publik (ucapan selamat datang, moto lembaga, baliho, iklan lembaga, dan lain-lain).

1.6 Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah model analisis kebahasaan berupa instrumen berupa variabel dan indikator penilaian yang disusun oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Adapun model instrument penilaian tersebut sebagai berikut.

1.6.1 Teori Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik

a. Kaidah kebahasaan yang meliputi ejaan, pilihan kata, dan struktur.

Kaidah yg meliputi penilaian ejaan meliputi tiga indikator penilaian

1. Tidak terdapat kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan,

2. Terdapat satu atau dua kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan, dan

3. Terdapat lebih dari dua kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan; hanya menggunakan sistem ejaan.

Kaidah yg meliputi pilihan kata meliputi tiga indikator penilaian

1. Tidak terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara.

2. Terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara.

3. Hanya menggunakan pilihan kata bahasa asing/bahasa tak resmi (kedaerahan). Kaidah yg meliputi kaidah struktur kebahasaan meliputi tiga indikator penilaian

1. Tidak terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa Negara

2. Terdapat kesalahan struktur dalam penyusunan frasa/kalimat bahasa negara

3. Hanya menggunakan struktur bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)

1.6.2 Fisik kebahasaan meliputi posisi, ukuran huruf, dan warna huruf.

Kaidah yg meliputi variabel posisi meliputi tiga indikator penilaian

1. Hanya menempatkan bahasa negara
2. Menempatkan bahasa negara di atas/di bawah/berdampingan dengan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi
3. Hanya menempatkan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi

Kaidah yg meliputi variabel ukuran huruf meliputi tiga indikator penilaian

1. Menggunakan bahasa negara saja (dalam ukuran apa pun); ukuran huruf bahasa negara lebih besar daripada bahasa asing dan/atau kedaerahan
2. Bahasa tak resmi (kedaerahan) membuat ukuran huruf bahasa negara sama dengan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi
3. Membuat ukuran huruf bahasa negara lebih kecil daripada bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan); hanya menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan) dalam ukuran apa pun

Kaidah yg meliputi variabel warna huruf meliputi tiga indikator penilaian

1. Menggunakan bahasa negara saja (dalam warna apa pun); warna bahasa negara lebih menonjol daripada bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
2. Membuat warna bahasa negara sama dengan warna bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
3. Membuat warna bahasa asing lebih mencolok daripada bahasa negara atau hanya menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi kedaerahan

1.6.3 Tipografi kebahasaan meliputi bahan, desain, dan kejelasan.

Kaidah yg meliputi variabel bahan meliputi tiga indikator penilaian

1. Terbuat dari bahan permanen (kayu, batu, kaca, atau kaca serat)
2. Terbuat dari bahan semipermanen (plastik, kain, atau *styrofoam*)
3. Terbuat dari bahan tidak permanen (kertas atau sejenisnya)

Kaidah yg meliputi variabel desain meliputi tiga indikator penilaian

1. Terlihat desain yang sangat menarik
2. Terlihat desain yang cukup menarik
3. Terbuat dari bahan tidak permanen (kertas atau sejenisnya)

Kaidah yg meliputi variabel kejelasan meliputi tiga indikator penilaian

1. Terlihat tulisan yang sangat jelas dan proporsional
 2. Terlihat tulisan yang kurang jelas dan kurang proporsional
 3. Terlihat tulisan yang tidak jelas dan tidak proporsional
2. Ukuran huruf kurang sesuai dengan kaidah
 3. Ukuran huruf tidak sesuai dengan kaidah

Berikut deskripsi variabel dan bobot skor penilaian masing-masing variabel

sesuai indikator yang sudah ditentukan baik dalam penilaian penggunaan bahasa di media luar ruang.

Bagan deskripsi Instrumen Penilaian Pengutamaan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik

Variabel	Skor	Kriteria
Fisik Kebahasaan		
Posisi	30	Hanya menempatkan bahasa Negara
	20	Menempatkan bahasa negara di atas/di bawah/berdampingan dengan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
	10	Hanya menempatkan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
Ukuran huruf	30	Menggunakan bahasa negara saja (dalam ukuran apa pun); ukuran huruf bahasa negara lebih besar daripada bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
	20	Membuat ukuran huruf bahasa negara sama dengan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
Variabel	Skor	Kriteria
	10	Membuat ukuran huruf bahasa negara lebih kecil daripada bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan); hanya menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan) dalam ukuran apa pun
	30	Menggunakan bahasa negara saja (dalam warna apa pun); warna bahasa negara lebih menonjol daripada bahasa asing

		dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
Warna huruf	20	Membuat warna bahasa negara sama dengan warna bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
	10	Membuat warna bahasa asing lebih mencolok daripada bahasa negara atau hanya menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
Kaidah Kebahasaan		
	30	Tidak terdapat kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan
Ejaan	20	Terdapat satu atau dua kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan
	10	Terdapat lebih dari dua kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan; hanya menggunakan sistem ejaan
Variabel	Skor	Kriteria
		bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
Pilihan kata	30	Tidak terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara
		Terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan

	20	lazim) untuk bahasa negara
	10	Hanya menggunakan pilihan kata bahasa asing/bahasa tak resmi (kedaerahan)
	30	Tidak terdapat kesalahan struktur dalam penyusunan frasa/kalimat (termasuk yang hanya menggunakan satu kata) bahasa negara
Struktur	20	Terdapat kesalahan struktur dalam penyusunan frasa/kalimat bahasa negara
	10	Hanya menggunakan struktur bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
Tipografi Kebahasaan		
Bahan	30	Terbuat dari bahan permanen (kayu, batu, kaca, atau kaca serat)
	20	Terbuat dari bahan semipermanen (plastik, kain, atau styrofoam)
	10	Terbuat dari bahan tidak permanen (kertas atau sejenisnya)
Desain	30	Terlihat desain yang sangat menarik
	20	Terlihat desain yang cukup menarik
	10	Terlihat desain yang tidak menarik

Variabel	Skor	Kriteria
Kejelasan	30	Terlihat tulisan yang sangat jelas dan proporsional
	20	Terlihat tulisan yang kurang jelas dan kurang proporsional
	10	Terlihat tulisan yang tidak jelas dan tidak proporsional

Nilai akhir penggunaan bahasa di ruang publik diperoleh dari nilai setiap kelompok objek dikalikan dengan bobot 50% untuk variabel fisik kebahasaan, 30% untuk variabel kaidah kebahasaan, dan 20% untuk variabel tipografi kebahasaan.

Nilai akhir tersebut akan menunjukkan tingkat pengutamaan bahasa negara di ruang publik lembaga.

Khusus untuk variabel fisik kebahasaan, setiap indikator diboboti kembali dengan besaran yang disesuaikan, yaitu 60% untuk indikator posisi, 20% untuk indikator warna huruf, dan 20% untuk indikator ukuran huruf. Pembobotan itu mengacu pada konsep pengutamaan bahasa negara: bobot terbesar diberikan pada variabel fisik kebahasaan. Pada akhirnya, pembobotan itu akan menghasilkan nilai skor maksimal 30 dan minimal 10 untuk setiap data objek yang dinilai.

bagian II		Kebahasaan		
Terkendali	Rentang	Fisik	Kaidah	Tipografi
A	2.601—3.000	++	++	++
B	2.201—2.600	+	+	+
C	1.800—2.200	-	+	+
D	1.400—1.799	-	-	-

Catatan:

Skor \leq 1.399 dikualifikasi dalam kategori belum terkendali.

Setelah penilaian semua variabel, selanjutnya penilaian keterkendalian terhadap pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Berikut deskripsi peringkat keterkendalian.

Terkendali A

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat terkendali: secara fisik tidak ditemukan bahasa asing; sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik.

Terkendali B

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya cukup terkendali: secara fisik tidak didominasi bahasa asing; jauh lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang makin baik.

Terkendali C

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali: secara fisik kurang didominasi bahasa asing; mulai lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.

Terkendali D

Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat kurang terkendali: secara fisik masih didominasi bahasa asing; sangat sedikit berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat kurang baik.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang di daerah Nusa Tenggara Barat.

1.7.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekelompok benda dalam hal ini media di ruang publik yang ada di beberapa perkantoran yang menjadi objek kajian di Nusa Tenggara Barat. Mengingat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup luas dan terbagi menjadi dua kepulauan besar, yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa, maka populasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Sumbawa. Secara umum, Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota. Di Pulau Lombok terdapat empat kabupaten dan satu kota. Komposisi yang sama juga terdapat di Pulau Sumbawa, terdiri atas empat kabupaten dan satu kota.

Pengambilan populasi dari lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan fokus kajian penelitian ini, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di daerah.

Pengambilan populasi ini juga untuk menunjukkan keterwakilan persebaran daerah yang ada di masing-masing pulau sehingga bisa terlihat persebaran penggunaan pemakaian bahasa negara di ruang publik. penggunaan pemakaian bahasa negara di ruang publik di pusat-pusat kota sebagai pusat pemerintahan dan daerah yang lebih relatif maju dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki lebih banyak pusat-pusat bisnis dan perbelanjaan sehingga menunjang pengambilan data untuk kajian ini.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1) Tulisan nama lembaga dan gedung, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama lembaga berbadan hukum Indonesia dan nama gedung utama yang terpampang di ruang publik. 2)

Tulisan nama sarana umum, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada sarana (tempat parkir, ruang tunggu, kantin, dan lain-lain) yang dapat dipakai oleh masyarakat umum yang ikut serta melaksanakan fungsi lembaga. 3) Tulisan nama

ruang pertemuan, objek ini merupakan bahasa yang digunakan dalam penamaan tempat pertemuan yang bersifat umum (nama aula, nama ruang rapat, balai sidang, dan lain-lain). 4) Tulisan nama produk barang/jasa, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk produk barang/jasa khas yang dihasilkan lembaga (nama jasaboga, bahan publikasi, nama laman, buku, dan lain-lain). 5) Tulisan nama jabatan, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk jabatan yang tercantum pada tempat atau ruangan kantor lembaga (tulisan jabatan pada meja atau ruangan pimpinan lembaga, dan lain-lain). 6) Tulisan penunjuk arah atau rambu umum, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada tulisan untuk mengarahkan publik menuju tempat tertentu atau melakukan sesuatu (tulisan masuk, keluar, dilarang parkir, dan lain-lain). 7) Tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya, objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada spanduk, kain rentang, slogan, imbauan, moto, atau informasi lain yang diketahui publik (ucapan selamat datang, moto lembaga, baliho, iklan lembaga, dan lain-lain).

Adapun penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode yang diterapkan oleh Roscoe (1975) yang menyatakan bahwa untuk penelitian multivarian ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar daripada jumlah variabel dalam penelitian tersebut. Dengan demikian, sampel untuk penelitian ini yaitu penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang. Namun begitu, jumlah sampel untuk media luar yang akan di ambil dalam penelitian ini lebih dari apa yang disarankan diatas guna mendapatkan penilaian yang lebih bagus. Jumlah yang akan diambil adalah 100 sampel perdaerah untuk pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Objek kajian ruang publik yang dijadikan sebagai sampel penelitian yakni sebagai berikut.

- a. Media ruang publik yang ada di instansi pemerintah empat lembaga sejumlah 40 objek foto.
- b. Media ruang publik yang ada di lembaga pendidikan empat lembaga sejumlah 40 objek foto.
- c. Media ruang publik yang ada di lembaga swasta dua lembaga sejumlah 20 objek foto.

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data data penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kedua jenis data tersebut dikumpulkan menggunakan metode lapangan dan portofolio. Pengumpulan data dan jumlah data yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis untuk pemantauan yang telah ditetapkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018.

Tabel 2

Jumlah Sampel Media Luar Ruang

No.	Kelompok Objek	Jumlah populasi dan sampel berdasarkan kategori	Keterangan
		Foto media luar	

		ruang	
1.	Papan nama lembaga pemerintah	40	Jumlah populasi sampel dikumpulkan berbentuk foto
2.	Papan nama lembaga pendidikan	40	
3.	Papan nama lembaga swasta berbadan hukum	20	

1.7.3 Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik (Ratna, 2004; 53). Ada lima (5) proses yang dilakukan. Kelima proses tersebut adalah (1) pengumpulan dan pengelompokan fakta-fakta temuan dari pengumpulan data, (2) analisis kesalahan berbahasa, (3) Analisis berdasarkan aspek-aspek yang telah ditentukan, (4) pembuatan kesimpulan, dan (5) pembuatan rekomendasi. Pengelompokan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data yang telah dikumpulkan. Data foto diklasifikasikan berdasarkan fenomena yang ditemukan.

Data yang diperoleh menggunakan dua metode di atas memiliki karakteristik tersendiri. Untuk itu, data tersebut dianalisis menggunakan metode penilaian penggunaan bahasa Indonesia di media luar ruang. (Pusat Pembinaan, 2016: 11).

Hasil dalam penelitian ini disampaikan dalam dua subbab, yaitu hasil analisis foto media luar ruang. Subbab pertama disampaikan menggunakan tabel hitung atau bagan dan deskripsi. Subbab kedua disampaikan dalam bentuk persentase dan analisis kualitatif kesalahan penggunaan bahasa di media luar ruang.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENGAMATAN

2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sepuluh kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116° 42' sampai dengan 118° 22' Bujur Timur dan 8° 8' sampai dengan 9° 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km². Kabupaten yang lebih dikenal dengan moto *Sabalong Samalewa* ini berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, Kabupaten Dompu di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-kota kecamatan rata-rata 45 km. Kota kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Tarano dengan jarak tempuh 103 km.

Utara	Laut Flores dan Teluk Saleh
Timur	Kabupaten Dompu
Selatan	Samudra Hindia
Barat	Kabupaten Sumbawa Barat

Wilayah Kabupaten Sumbawa juga mencakup sejumlah pulau-pulau di sebelah utara Pulau Sumbawa, termasuk Pulau Moyo (pulau terbesar), Pulau Medang, Pulau Panjang, Pulau Liang, Pulau Ngali dan Pulau Rakit. Pada tanggal 18 Desember 2003, Lahirnya

Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa

Nomor 06/KPTS/DPRD, tanggal 29 Mei 1990 dengan jumlah 14 kecamatan. Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 22

Tahun 1999, Kabupaten Sumbawa dimekarkan dan bertambah lima kecamatan,

sehingga menjadi 25 kecamatan kemudian bagian barat wilayah Kabupaten Sumbawa dimekarkan menjadi kabupaten baru, yakni Kabupaten Sumbawa Barat.

Sarana dan prasarana umum yang mendukung perekonomian di Kabupaten Sumbawa juga cukup baik. Sarana tersebut meliputi pasar, bank dan koperasi.

2.2 Penduduk

Penduduk Kabupaten Sumbawa berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 445.503 jiwa yang terdiri atas 227.323 jiwa penduduk laki-laki dan 218.180 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk pulau Sumbawa mengalami pertumbuhan sebesar 1,00 persen.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104 %.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumbawa tahun 2016 mencapai 67 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per-rumah tangga empat orang.

Kepadatan Penduduk di 24 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sumbawa dengan kepadatan sebesar 1.358 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Orong Telu sebesar 10 jiwa/Km².

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Hasil Penilaian Pemantauan Media Luar Ruang

Hasil kegiatan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik serta penilaiannya di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Tabel 1

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Objek	Total Nilai	Kualifikasi, Terkendali			
				A	B	C	D
				2.601	2.201	1.800	1.400
				3.000	2.600	2.200	1.799
1	Sumbawa	99	2.717				
	Jumlah	99	2.717				

3.2 Deskripsi Peringkat Keterkendalian

Berdasarkan hasil analisis foto-foto pemantauan pengutamaan bahasa negara di ruang publik di Kabupaten Sumbawa maka hasilnya dapat dilihat pada tabel tabulasi sebagai berikut.

Nama Wilayah: Kab. Sumbawa

TABEL 2 TABULASI DATA PENILAIAN KETERKENDALIAN

No.	Kode Data	Kaidah Kebahasaan (30%)			Nilai KK Bobot	Fisik Kebahasaan (50%)			Nilai FK Bobot	Tipografi Kebahasaan (20%)			Nilai TK Bobot	Jumlah			
		Ejaan	Pilihan Kata	Struktur		Postisi (60%)	Nilai x Bobot	Ukuran Huruf (20%)		Nilai x Bobot	Warna Huruf (20%)	Nilai x Bobot			Bahan	Desain	Kejelasan
1	18-1/TM--1	20	20	30	7.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	5.3	29.3
2	18-1/TM--2	20	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	20	30	4.7	27.7
3	18-1/TM--3	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	20	30	4.7	27.7
4	18-1/TM--4	30	30	30	9.0	30	12.0	30	4.0	30	4.0	10.0	30	30	20	2.0	19.0
5	18-1/TM--5	20	30	30	8.0	30	12.0	30	4.0	30	4.0	10.0	10	30	30	2.0	19.0
6	18-1/TM--6	20	20	30	7.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	5.3	27.3
7	18-1/TM--7	30	30	30	9.0	30	12.0	30	2.0	30	2.0	8.0	30	30	30	5.3	22.3
8	18-1/TM--8	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	5.3	28.3
9	18-1/TM--9	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	20	30	5.3	25.3
10	18-1/TM--10	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	10	20	4.7	27.7
11	18-1/TM--11	30	30	30	9.0	10	6.0	10	6.0	10	2.0	5.0	30	30	30	5.3	27.3
12	18-1/TM--12	30	30	30	9.0	10	6.0	10	6.0	10	2.0	5.0	30	30	30	5.3	28.3

Jumlah	2717	Tingkat: Terkendali A
--------	------	--------------------------

52	18-LTM--52	30	30	30	30	30	9.0	30	6.0	30	2.0	30	2.0	5.0	30	30	30	30	4.7	14.7
51	18-LTM--51	30	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	29.3
50	18-LTM--50	30	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	29.3
49	18-LTM--49	30	30	30	30	30	7.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	4.0	26.0
48	18-LTM--48	20	30	30	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	29.3
47	18-LTM--47	30	30	30	30	30	9.0	20	12.0	20	4.0	20	4.0	10.0	30	30	30	30	2.7	26.7
46	18-LTM--46	30	30	30	30	30	9.0	20	12.0	20	4.0	20	4.0	10.0	30	30	30	30	4.0	28.0
45	18-LTM--45	20	30	30	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	4.7	25.7
44	18-LTM--44	30	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	30	30	5.3	29.3
43	18-LTM--43	10	10	10	10	10	3.0	10	6.0	10	2.0	10	2.0	5.0	30	30	30	30	5.3	28.3
42	18-LTM--42	30	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	29.3
41	18-LTM--41	20	20	20	20	20	7.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	28.3
40	18-LTM--40	30	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	29.3
39	18-LTM--39	30	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	29.3
38	18-LTM--38	30	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	20	6.0	15.0	30	30	30	20	4.7	28.7
37	18-LTM--37	30	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	10	10	30	5.3	28.3
36	18-LTM--36	30	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	29.3
35	18-LTM--35	20	30	30	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	10	10	10	4.7	28.7
34	18-LTM--34	30	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	30	30	6.0	30.0
33	18-LTM--33	30	30	30	30	30	9.0	30	6.0	30	2.0	30	2.0	5.0	30	30	30	30	4.7	14.7

53	18-LTM--53	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	29.3
54	18-LTM--54	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	29.3
55	18-LTM--55	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	29.3
56	18-LTM--56	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	30	5.3	29.3
57	18-LTM--57	30	30	30	30	9.0	30	12.0	30	2.0	30	2.0	8.0	10	30	30	30	6.0	23.0
58	18-LTM--58	30	30	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	30	5.3	28.3
59	18-LTM--59	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	3.3	27.3
60	18-LTM--60	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	2.7	24.7
61	18-LTM--61	20	30	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	3.3	25.3
62	18-LTM--62	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	3.3	27.3
63	18-LTM--63	20	30	30	30	9.0	10	6.0	10	2.0	10	2.0	5.0	10	30	30	30	5.3	29.3
64	18-LTM--64	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	30	30	5.3	28.3
65	18-LTM--65	10	10	10	10	8.0	10	6.0	10	2.0	10	2.0	5.0	30	30	30	30	5.3	29.3
66	18-LTM--66	20	30	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	30	6.0	30.0
67	18-LTM--67	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	30	5.3	29.3
68	18-LTM--68	30	30	30	30	9.0	20	12.0	20	4.0	20	4.0	10.0	30	30	30	30	5.3	29.3
69	18-LTM--69	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	30	5.3	29.3
70	18-LTM--70	20	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	30	5.3	27.3
71	18-LTM--71	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	30	4.7	26.7
72	18-KLU--72	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	30	4.0	27.0

73	18-LTM--73	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	4.7	27.7
74	18-LTM--74	20	30	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	30	5.3	29.3
75	18-LTM--75	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	5.3	29.3
76	18-LTM--76	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	30	5.3	29.3
77	18-LTM--77	30	30	30	30	9.0	20	18.0	20	6.0	20	6.0	15.0	10	30	30	5.3	29.3
78	18-LTM--78	20	30	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	5.3	29.3
79	18-LTM--79	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	6.0	30.0
80	18-LTM--80	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	6.0	29.0
81	18-LTM--81	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	4.0	26.0
82	18-LTM--82	20	20	20	20	6.0	20	18.0	20	6.0	20	6.0	15.0	30	30	30	6.0	30.0
83	18-LTM--83	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	5.3	29.3
84	18-LTM--84	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	5.3	29.3
85	18-LTM--85	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	30	5.3	29.3
86	18-LTM--86	20	30	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	30	5.3	29.3
87	18-LTM--87	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	30	5.3	29.3
88	18-LTM--88	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	4.0	28.0
89	18-LTM--89	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	5.3	29.3
90	18-LTM--90	20	30	30	30	8.0	30	6.0	30	2.0	30	2.0	5.0	20	30	30	6.0	20.0
91	18-LTM--91	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	20	6.0	30.0
92	18-LTM--92	20	30	30	30	8.0	30	12.0	30	4.0	30	4.0	10.0	10	20	30	3.3	22.3

98	18-LTM--98	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	30	2.7	26.7
94	18-LTM--94	20	30	30	30	6.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	2.7	26.7
95	18-LTM--95	30	30	30	30	9.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	6.0	29.0
96	18-LTM--96					0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10	30	30	0.0	00.0
97	18-LTM--97	30	30	30	30	6.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	30	6.0	15.0	10	30	30	4.7	28.7
98	18-LTM--98	20	30	30	30	6.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	30	6.0	15.0	20	30	30	6.0	30.0
99	18-LTM--99	20	30	30	30	8.0	30	18.0	30	6.0	30	6.0	30	6.0	15.0	30	30	30	5.3	27.3
100	18-LTM--100	20	30	30	30	0.0	30	0.0	30	0.0	30	0.0	30	0.0	0.0	30	30	30	6.0	0.0
		Jumlah																		
		2717.7																		

Catatan:

1. Lembar kerja ini hanya untuk satu wilayah kabupaten/kota.

2. Kolom rumus telah diproteksi, sehingga Tim Penilai hanya dapat mengisi kolom yang kosong.

3. Kolom kode data diisi berdasarkan petunjuk kodifikasi data pada Petunjuk Teknis Pengukuran Bahasa Negara di Ruang Publik Tahun 2018.

4. Kolom variabel penilaian diisi dengan nilai skor 10, 20, atau 30 berdasarkan instrumen penilaian pada Petunjuk Teknis Pengukuran Bahasa Negara di Ruang Publik Tahun 2018.

5. Skor $\leq 1,399$ dikualifikasi dalam kategori belum terkendali.

Peringkat

Keterkendalian:

Terkendali A 2.601-3.000

Terkendali B 2.301-2.600

Terkendali C 1.800-2.300

Terkendali D 1.400-1.799

B. Fisik Kebahasaan

1. Dari segi posisi terdapat 84 data foto yang mendapatkan nilai 30 artinya data foto tersebut hanya menempatkan bahasa negara, sedangkan untuk nilai 20 terdapat enam data foto yang menempatkan bahasa Negara di atas/di bawah/berdampingan dengan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan). empat data foto yang hanya menempatkan bahasa asing dan bahasa daerah.

2. Dari segi ukuran huruf terdapat 80 data foto yang mendapatkan nilai 30 menggunakan bahasa Negara saja, ukuran huruf bahasa Negara lebih besar dari bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan). Kemudian terdapat tujuh data foto dengan nilai 20 yang membuat ukuran huruf bahasa Negara sama dengan bahasa asing atau bahasa daerah. Untuk nilai 10 ada sembilan data foto yang menggunakan ukuran huruf bahasa negara lebih kecil dari bahasa asing atau bahasa daerah.

3. Dari segi warna huruf terdapat 82 data foto yang mendapatkan nilai 30 yang menggunakan bahasa Negara saja dalam warna apapun dan warna bahasa Negara lebih menonjol daripada bahasa asing atau bahasa daerah. Untuk nilai 20 terdapat tujuh data foto yang termasuk membuat warna bahasa negara sama dengan bahasa asing atau bahasa daerah, sedangkan tujuh data foto yang nilainya 10 menggunakan warna bahasa asing lebih mencolok daripada bahasa negara atau hanya menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah.

A. Kaidah Kebahasaan

1. Pada tabel di atas kita bisa melihat atau membaca ada 7 data foto yang mendapat nilai 10 dari segi ejaannya. Hal ini berarti terdapat lebih dari dua kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan hanya menggunakan sistem ejaan bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan), sedangkan untuk nilai 30 ada 68 data foto yang tidak terdapat kesalahan dan nilai 20 ada 24 data foto yang terdapat satu atau dua kesalahan pemakaian ejaan.

2. Dari segi pilihan kata terdapat 85 data foto yang mendapat nilai 30, artinya tidak terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa Negara, sedangkan untuk nilai 20 ada lima data foto yang berarti memiliki kesalahan dalam pemilihan kata. Untuk nilai 10 terdapat enam data foto yang termasuk dalam kategori hanya menggunakan pilihan kata bahasa asing/bahasa tak resmi (kedaerahan).

3. Dari segi struktur terdapat 88 data foto yang mendapat nilai 30 artinya tidak terdapat kesalahan struktur dalam penyusunan frase/kalimat (termasuk yang hanya menggunakan satu kata) bahasa Negara, sedangkan untuk nilai 20 terdapat empat data foto yang berarti terdapat kesalahan struktur dalam penyusunan frase/kalimat bahasa negara. Ada dua data foto yang mendapatkan nilai 10 yang berarti hanya menggunakan struktur bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan).

C. Tipografi Kebahasaan

1. Dari segi bahan terdapat 81 data foto yang mendapatkan nilai 30 yang berarti tulisan tersebut terbuat dari bahan permanen (kayu, batu, kaca, atau kaca serat).

Untuk tulisan yang terbuat dari bahan semipermanen (plastik, kain, atau Styrofoam) pada tabel dua di atas ada 24 data foto yang nilainya 20, sedangkan tulisan yang terbuat dari bahan tidak permanen (kertas atau sejenisnya) terdapat 14 data foto dengan nilai 10.

2. Dari segi desain terdapat lima data foto yang nilainya 20 yang desainnya terlihat cukup menarik, sedangkan untuk desain tulisan yang sangat menarik ada 89 data foto dengan nilai 30, sisanya dua data foto yang nilainya 10 terlihat desainnya tidak menarik.

3. Dari segi kejelasan tulisan terdapat 82 data foto yang nilainya 30 terlihat tulisannya sangat jelas dan proporsional. Ada tiga data foto nilainya 20 untuk tulisan yang terlihat kurang jelas dan kurang proporsional sedangkan sisanya ada dua data foto nilainya 10 yang tulisannya tidak jelas dan tidak proporsional.

Berdasarkan data pada tabel 2 tersebut bisa disimpulkan bahwa di Kabupaten Sumbawa bila kita gabungkan nilai yg dihasilkan dari segi kaidah kebahasaan, fisik kebahasaan dan tipografi kebahasaan mendapatkan nilai 2717,7. Hal ini menunjukkan penggunaan kaidah bahasanya di ruang publik sudah terkendali, hanya sedikit terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing. Secara fisik didominasi

oleh Bahasa Indonesia. Penggunaan Bahasa Indonesia yang lebih banyak dengan tipografi kebahasaan yang sangat baik.

3.2 Kendala

Kegiatan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 ini, tentu saja tidak lepas dari beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain karena kurang kooperatifnya satu lembaga yang dikunjungi sehingga data yang diminta kurang memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Kajian kegiatan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik di kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Penggunaan bahasa di Kabupaten Sumbawa mendapatkan hasil dengan Kategori terkendali A, Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa negara di ruang publiknya sangat terkendali: secara fisik tidak didominasi bahasa asing; jauh lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah bahasa dan tipografi yang sangat baik.

4.2 Saran

Berdasarkan predikat kategori terkendali A tersebut harus dipertahankan sehingga masih perlu diadakan lagi pembenahan-pembenahan dengan sosialisasi tentang kebijakan kebahasaan. Untuk itu, Kantor Bahasa Nusa Tenggara dengan kegiatan penyuluhan bahasa yang berpatokan pada UU No. 24 Tahun 2009, Permendikbud No. 46 Tahun 2009, dan PP No. 50 Tahun 2015 tanggal 26 November 2016 dapat meningkatkan pemahaman penggunaan bahasa Indonesia, daerah, dan asing kepada para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Arip, Antoni, M. Zuari. 2011. *"Teori Belajar Behaviorisme, Kognitivisme, dan Konstruktivisme"*. <http://antonizonzai.wordpress.com/2011/02/05/teori-belajar-behaviorisme-kognitivisme-dan-konstruktivisme/>. Diunduh tanggal, 11 Oktober 2014.

Brown, H. Douglas. 1999. *Principles of Language Learning and Teaching*. New York: Addison Wesley, Inc.

Chaer, Abdul. 2002. *Psikolinguistik Kajian Teoretik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dardjowidjojo, Soendjono. 2005. *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Emondson, Willis, Juliane House. 2000. *Einführung in die Sprachlehrforschung*. Tübingen: A. Francke Verlag.

Hadley, Alice Omaggio. 1993. *Teaching Language in Context*. Boston: Heinle&Heinle.

Lightbown, Patsy M. and Nina Spada. 2003. *How languages are Learned*. New York: Oxford.

Mahfud, Safuan. 2013. *"Teori Belajar Bahasa (Behavioris)"*. <http://caramenyusunmakalah.blogspot.com/2013/02/teori-belajar-bahasa-teori-behavioris.html>. Diunduh 2 Oktober 2014.

Mustakim, 2014. *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Bentuk dan Pilihan Kata*. Jakarta: Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Rubin, Joan and Irene Thompson. 1994. *How to be a More Successful Language Learner*. Second Edition. USA: Heinle&Heinle Publishers.

Sasangka, Sry Catur Wisnu. 2014. *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Kalimat*.

Jakarta: Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Suladi, 2014. *Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia: Paragraf*. Jakarta: Badan

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Tim Pengembangan Pedoman Bahasa Indonesia, 2016. *Seri Penyuluhan Bahasa*

Indonesia: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Zabadi, Faerul, dkk., 2013. *Buku Guru Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan*.

Jakarta: Politeknik Negeri Media Kreatif.

Zabadi, Faerul, dkk., 2013. *Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan Kelas VII*.

Jakarta: Politeknik Negeri Media Kreatif.

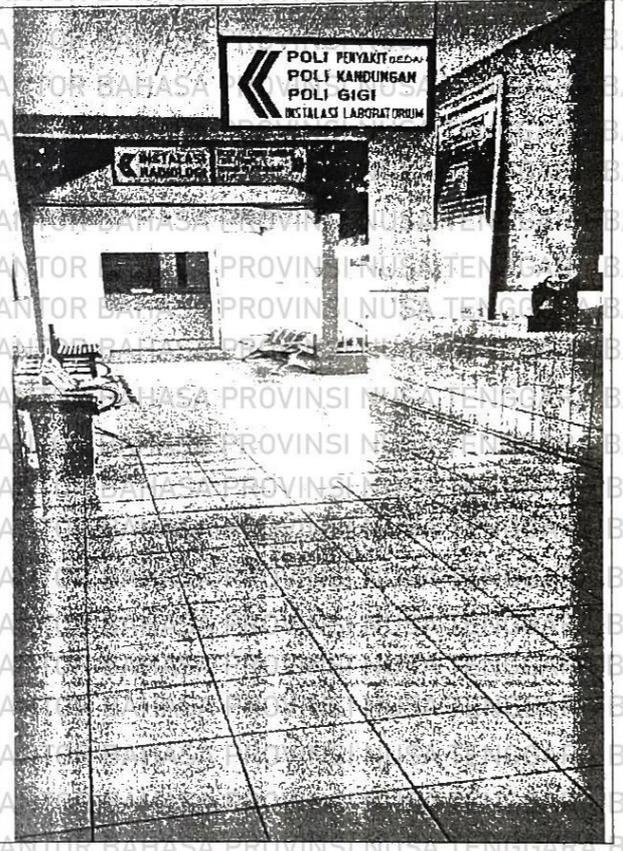
**DATA FOTO PEMANTAUAN PENGGUNAAN BAHASA NEGARA
DI MEDIA LUAR RUANG DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019**

No.	Kode Wilayah, Daerah, No. Urut	Nama Objek dan Kode Objek	DATA FOTO
1.	18—SBW—1	TULISAN BERBENTUK SPANDUK ATAU ALAT INFORMASI LAIN SEJENISNYA—7	
2.	18—SBW—2	TULISAN BERBENTUK SPANDUK ATAU ALAT INFORMASI LAIN SEJENISNYA--7	

3. 18— SBW —3
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7



4. 18— SBW —4
TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU
RAMBU UMUM--6

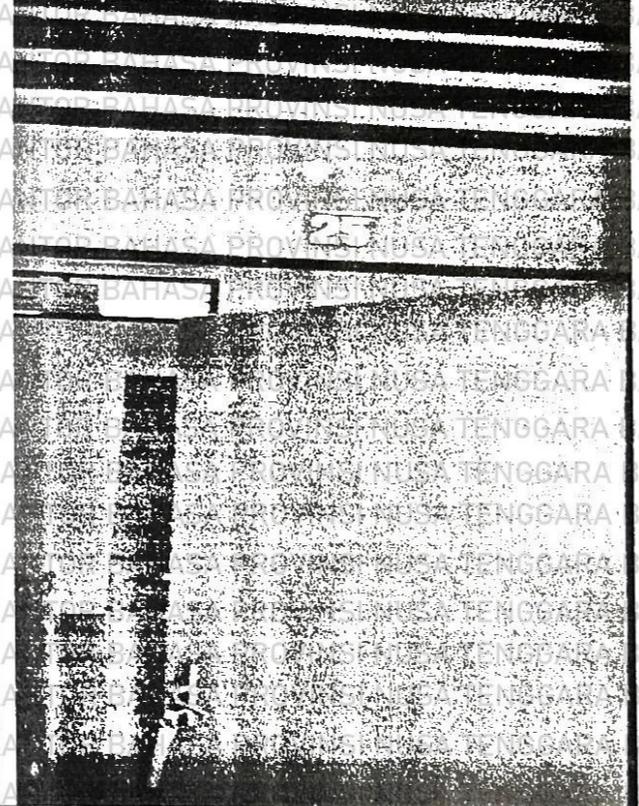


<p>5.</p>	<p>18— SBW —5</p>	<p>TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU RAMBU UMUM--6</p>	
<p>6.</p>	<p>18— SBW —6</p>	<p>TULISAN BERBENTUK SPANDUK ATAU ALAT INFORMASI LAIN SEJENISNYA—7</p>	

13	18—SBW—13	TULISAN NAMA SARANA UMUM—2
----	-----------	-------------------------------



14	18—SBW—14	TULISAN BERBENTUK SPANDUK ATAU ALAT INFORMASI LAIN SEJENISNYA—7
----	-----------	---



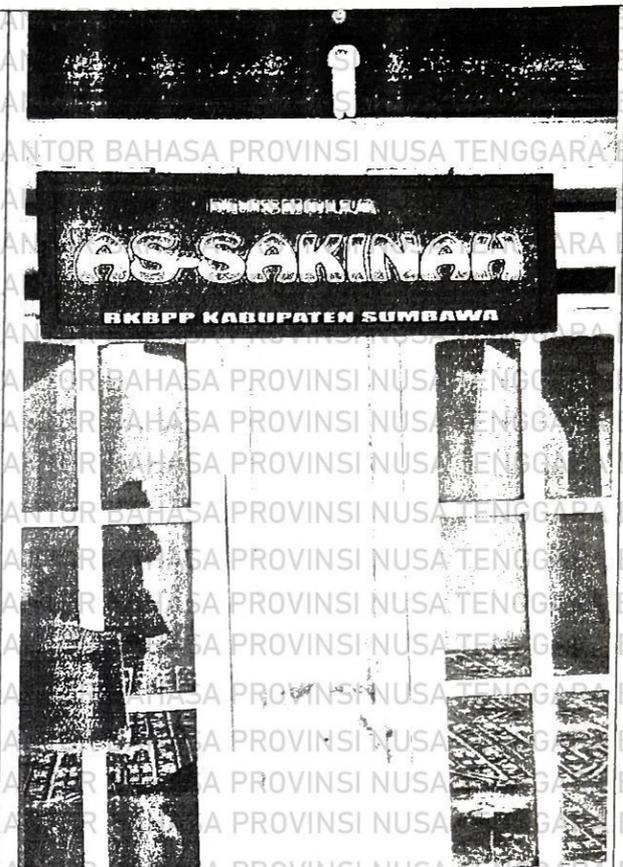
19. 18—SBW—19 TULISAN NAMA PRODUK
BARANG/JASA—4



20. 18—SBW—20 TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU
RAMBU UMUM--6



23. 18—SBW—23 TULISAN NAMA SARANA
UMUM--2



24. 18—SBW—24 TULISAN NAMA LEMBAGA DAN
GEDUNG--1



25. 18 SBW 25
TULISAN NAMA LEMBAGA DAN
GEDUNG--1



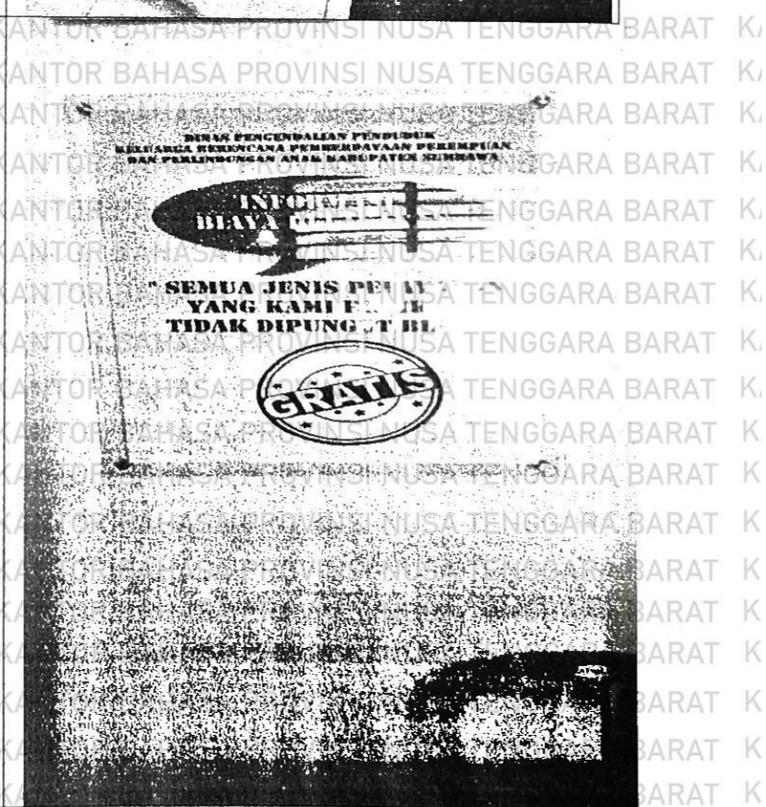
26. 18 SBW 26
TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU
RAMBU UMUM--6



29. 18— SBW —29
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7



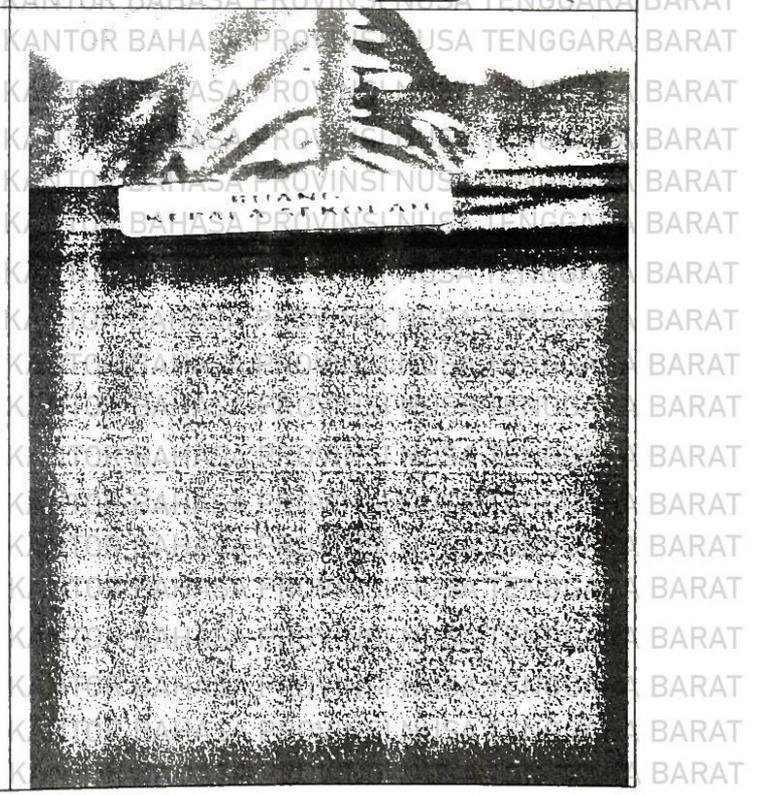
30. 18— SBW —30
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7



33. 18— SBW —33
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7



34. 18— SBW —34
TULISAN NAMA JABATAN—5



35.	18—SBW—35	TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU RAMBU UMUM--6
-----	-----------	--



36.	18—SBW—36	TULISAN NAMA SARANA UMUM--2
-----	-----------	-----------------------------



37.	18— SBW —37	TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU RAMBU UMUM--6
-----	-------------	--



38.	18— SBW —38	NAMA LEMBAGA DAN GEDUNG—1
-----	-------------	---------------------------



39 18—SBW—39

TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7

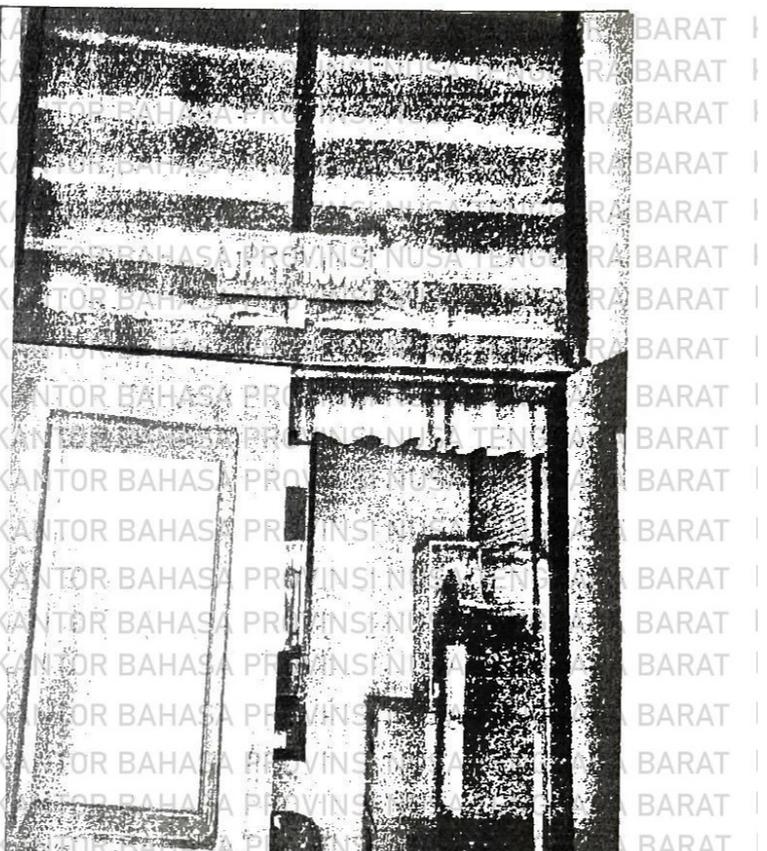


40 18—SBW—40

TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7



43.	18—SBW—43	TULISAN NAMA SARANA UMUM--2
-----	-----------	--------------------------------



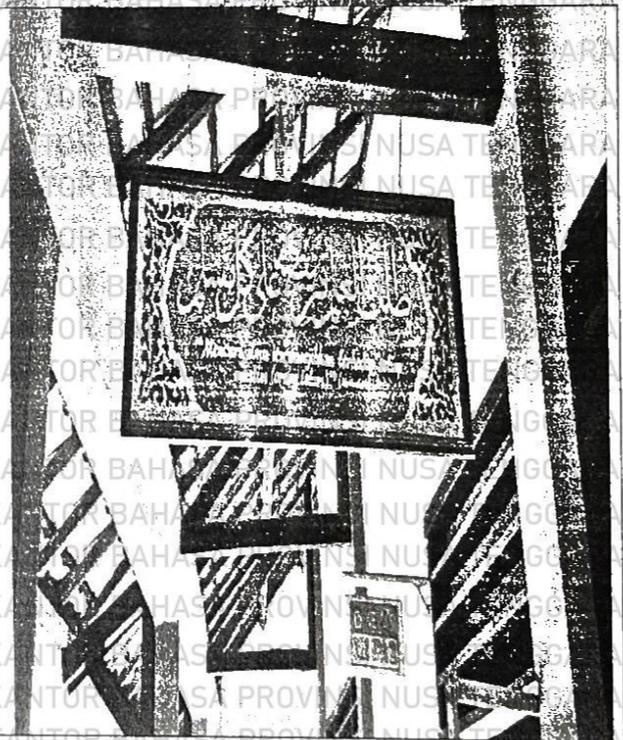
44.	18—SBW—44	TULISAN BERBENTUK SPANDUK ATAU ALAT INFORMASI LAIN SEJENISNYA--7
-----	-----------	--



45. 18— SBW —45 TULISAN NAMA LEMBAGA DAN GEDUNG—1



46. 18— SBW —46 TULISAN BERBENTUK SPANDUK ATAU ALAT INFORMASI LAIN SEJENISNYA—7



49. 18— SBW —49

TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU
RAMBU UMUM--6



50. 18— SBW —50

TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU
RAMBU UMUM--6



53. 18— SBW—53
TULISAN NAMA SARANA
UMUM--2



54. 18— SBW —54
TULISAN NAMA SARANA
UMUM--2



55. 18— SBW —55
TULISAN NAMA SARANA
UMUM--2



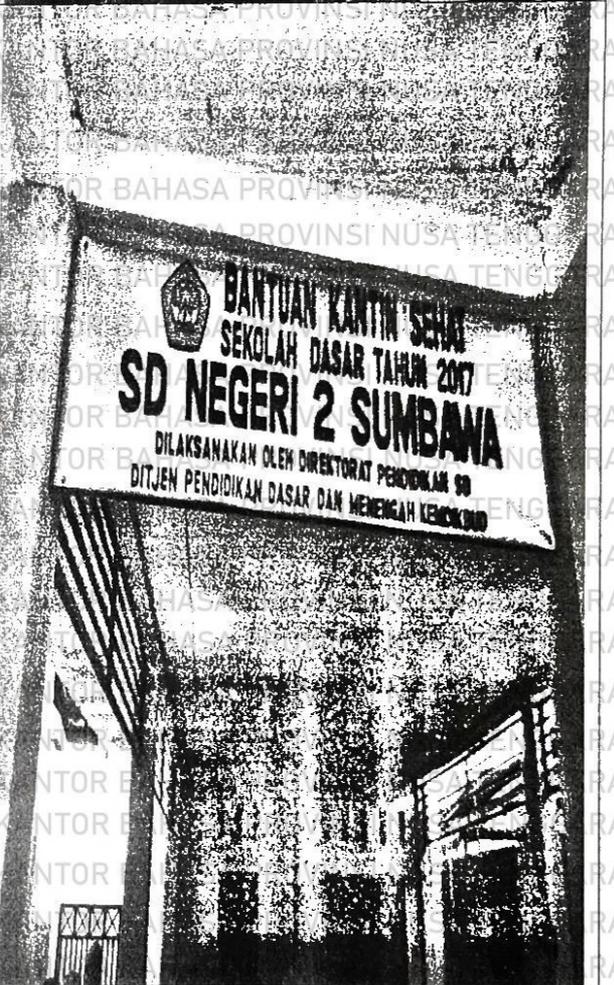
56. 18— SBW —56
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA--7



57.	18— SBW —57	TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU RAMBU UMUM--6
-----	-------------	--



58.	18— SBW —58	TULISAN NAMA SARANA UMUM-2
-----	-------------	----------------------------



63. 18— SBW —63
TULISAN NAMA SARANA
UMUM—2



64. 18— SBW —64
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7

- Kenakalan Remaja
- Bahaya Merokok
- Narkoba
- HIV/Aids
- Kehamilan Pra Nikah
- Kecacingan
- Anemia
- Hepatitis

65. 18 - SBW - 65
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA - 7



66. 18 - SBW - 66
TULISAN NAMA SARANA
UMUM - 2



69. 18—SBW—69 TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU RAMBU UMUM--6

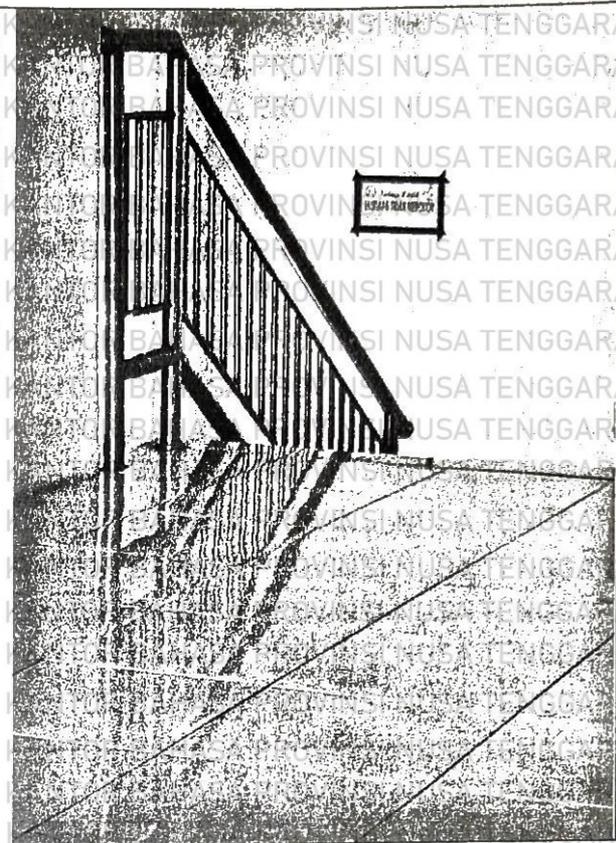


70. 18—SBW—70 TULISAN NAMA LEMBAGA DAN GEDUNG--1



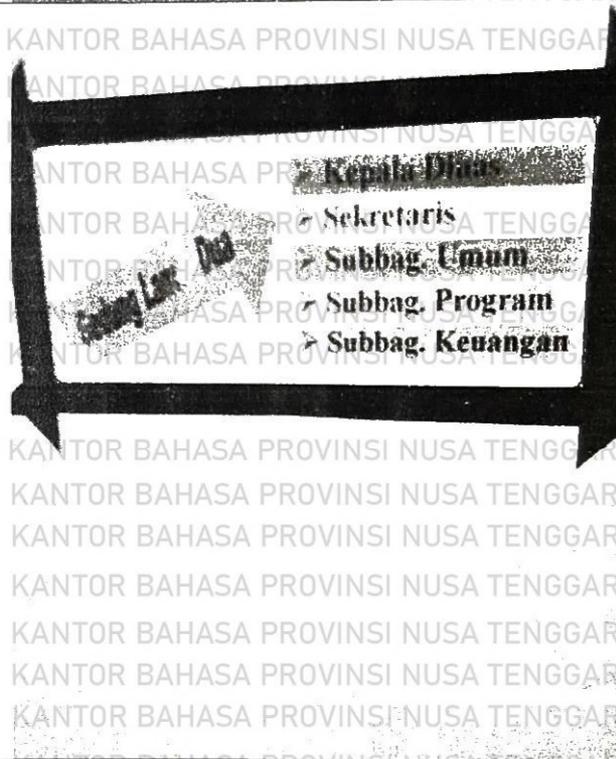
73. 18— SBW — 73

TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU
RAMBU UMUM--6



74. 18— SBW — 74

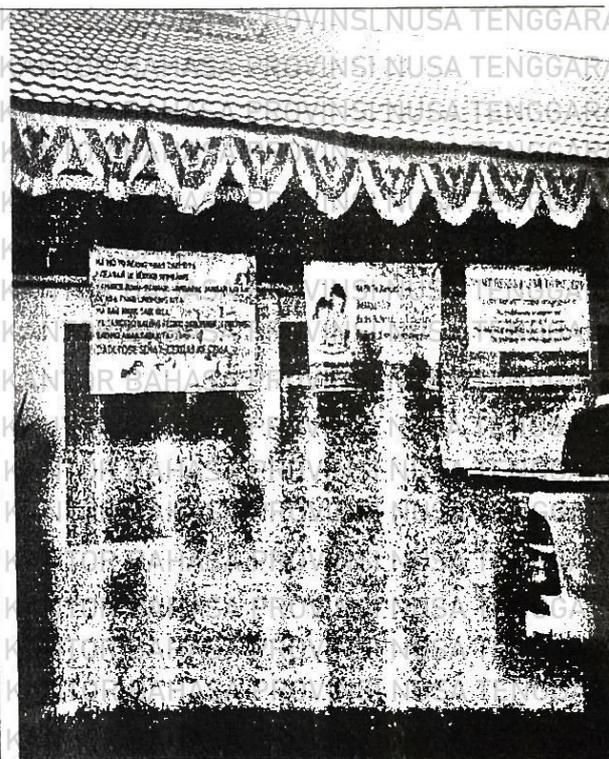
TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU
RAMBU UMUM--6



75. 18—SBW—75 TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7



76. 18—SBW—76 TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7



77.	18— SBW —77	TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU RAMBU UMUM--6	
78.	18— SBW —78	TULISAN BERBENTUK SPANDUK ATAU ALAT INFORMASI LAIN SEJENISNYA--7	

81. 18—SBW—81 TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU RAMBU UMUM—6



82. 18—SBW—82 TULISAN BERBENTUK SPANDUK ATAU ALAT INFORMASI LAIN SEJENISNYA—7



85. 18—SBW—85
TULISAN NAMA PRODUK
BARANG/JASA—4



86. 18—SBW—86
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7



87. 18— SBW —87
TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU
RAMBU UMUM—6



88. 18— SBW —88
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7



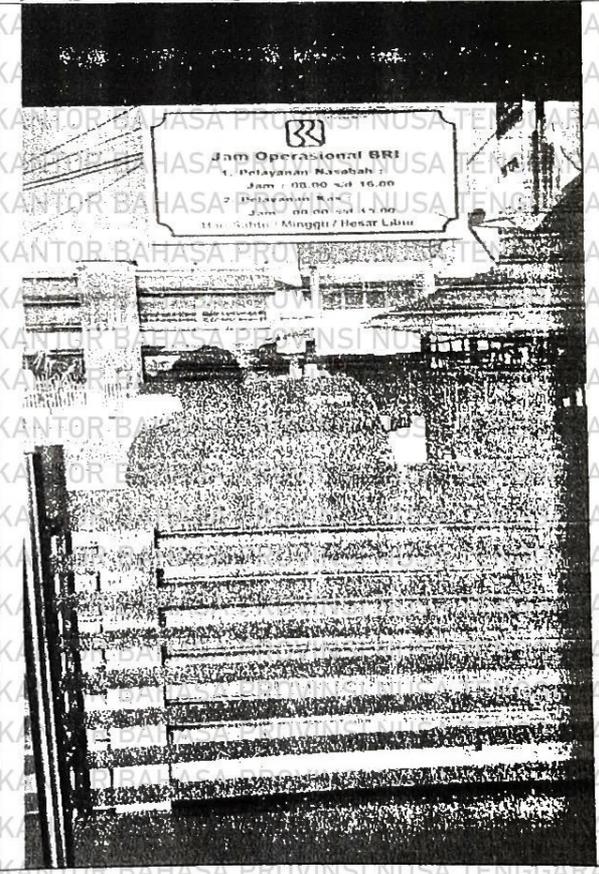
89. 18—SBW—89

NAMA LEMBAGA DAN GEDUNG—1

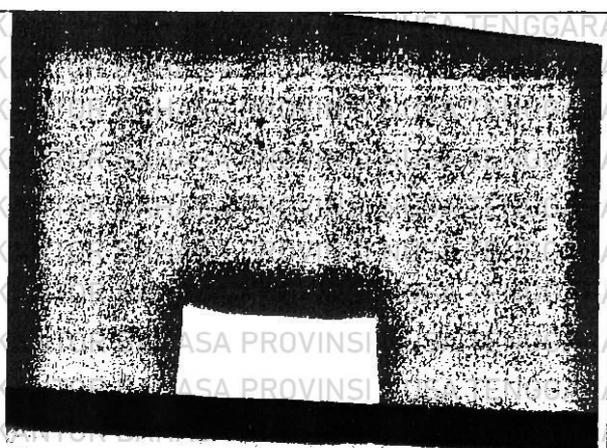


90. 18—SBW—90

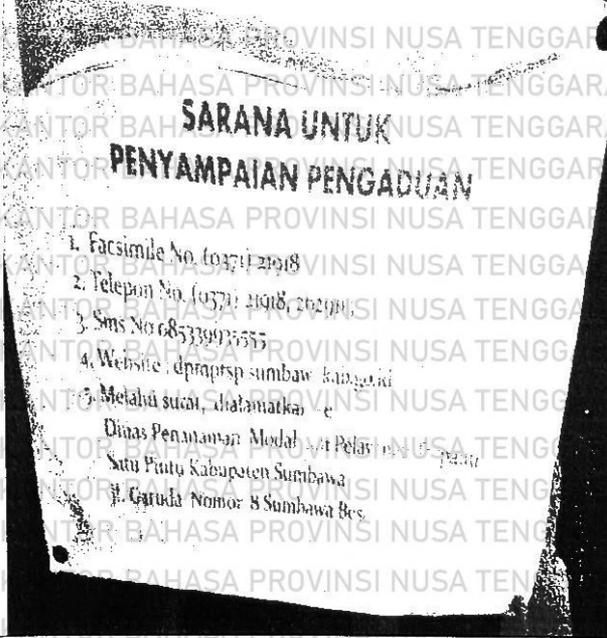
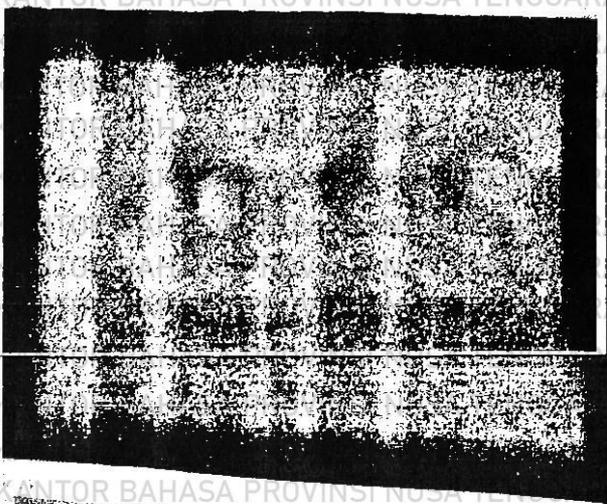
TULISAN BERBENTUK SPANDUK ATAU ALAT INFORMASI LAIN SEJENISNYA—7



91. 18— SBW —91
TULISAN NAMA SARANA
UMUM--2



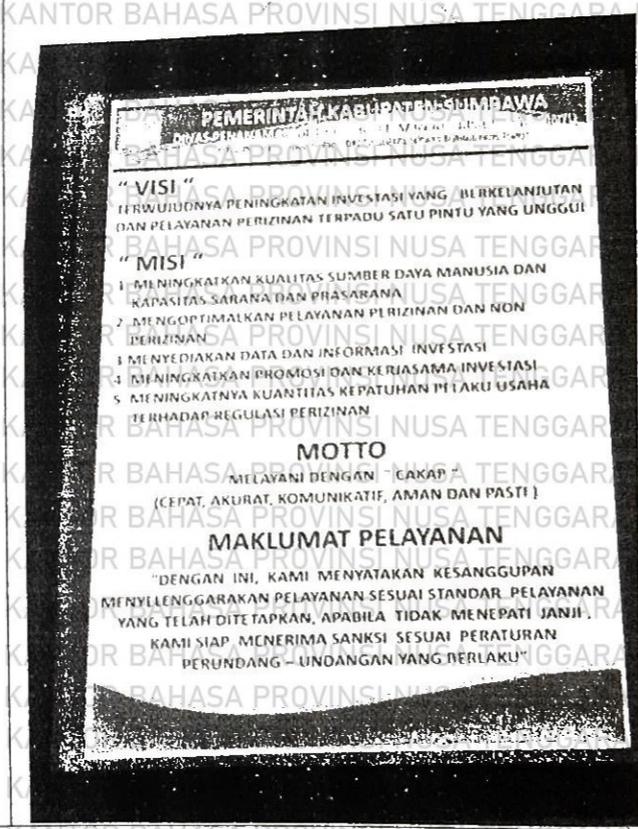
92. 18— SBW —92
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA--7



93. 18—SBW—93
TULISAN PENUNJUK ARAH ATAU
RAMBU UMUM—6



94. 18—SBW—94
TULISAN BERBENTUK SPANDUK
ATAU ALAT INFORMASI LAIN
SEJENISNYA—7



99. 18—SBW—99 TULISAN NAMA LEMBAGA DAN GEDUNG—1



100. 18—SBW—100 TULISAN NAMA JABATAN-- 5



KERANGKA ACUAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHASA
DI MEDIA LUAR RUANG KABUPATEN SUMBAWA
KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

2019

1. Latar Belakang

Penggunaan bahasa di ruang publik merupakan cerminan sikap atas kompetensi penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan sikap positif, yaitu sikap tertib berbahasa, agar penggunaan bahasa di ruang public sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah kebahasaan. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu menciptakan ketertiban berbahasa dengan mengendalikan bahasa asing guna menguatkan bahasa negara di ruang publik. Pelemahan bahasa negara cenderung terjadi seiring dengan penguatan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di ruang publik. Pemartabatan bahasa Indonesia telah diupayakan, tidak jarang dijumpai di ruang publik bahasa resmi dalam NKRI ini terdesak posisinya menjadi lebih rendah. Untuk itu, upaya pembinaan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan situasi tertib berbahasa di Indonesia.

Pengaturan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lingua franca bagi berbaga etnis dengan bahasa yang berbeda di Indonesia tidak lain karena ruang publik (*public space*) bukanlah ruang privat melainkan ruang yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan arena bagi masyarakat untuk berinteraksi (Jurgen Habermas dalam Kadarsih, 2008: 1). Ruang publik tidak membatasi siapa yang dapat mengunjunginya sehingga siapa saja dapat menikmati fasilitas umum yang ada tersebut.

Ruang public tidak memberikan akses kepada etnis tertentu, tetapi memberikan keluasaan bagi siapa saja yang mau menikmati fasilitas yang ada di sana. Ruang publik merupakan

tempat interaksi yang bersifat umum. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lingua franca bagi etnis dengan bahasa yang berbeda wajib hadir dan diutamakan karena hanya bahasa Indonesia yang secara hukum diakui dan dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ada tiga hal yang menjadi pusat perhatian pengutamaan bahasa negara di ruang publik, fisik kebahasaan meliputi kaidah kebahasaan, fisik kebahasaan dan tipografi kebahasaan. Berkaitan dengan Pemantauan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat melakukan kegiatan tersebut sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik di Kabupaten Sumbawa

b. Tujuan

Sebagai bahan kajian dan pertimbangan perencanaan pengembangan dan pembinaan bahasa di daerah, kajian ini memiliki tujuan mendeskripsikan pengutamaan bahasa negara di ruang publik, fisik kebahasaan meliputi kaidah kebahasaan, fisik kebahasaan dan tipografi kebahasaan di Kabupaten Sumbawa.

3. Keluaran

Hasil yang diharapkan dalam kajian ini merupakan kajian terapan kaidah-kaidah kebahasaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan tentang

kebahasaan bagi pengkaji, pembaca, dan lebih khusus kepada pemerintah dan pemerintah

daerah dalam menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang sesuai dan benar dalam media luar ruang.

4. Tempat dan Waktu

Lokasi yang menjadi daerah pengamatan dalam kajian ini adalah di Kabupaten Sumbawa dan dilaksanakan pada tahun 2019

5. Jawal Kegiatan

Adapun jadwal kegiatan dalam pengumpulan data ini dilakukan mulai tanggal 4—6 Maret 2019 dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

Kegiatan	Tahun 2019											
	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Persiapan												
a) Studi pustaka	√											
b) Penyusunan rancangan penelitian dan seminar proposal		√										
2. Pencarian data												
a) Pencarian data di lapangan			√									
b) Seleksi data			√									
c) Klasifikasi data			√									
3. Analisis data												
a) Koreksi data				√	√							
b) Analisis dan deskripsi data				√	√							
c) Penyimpulan hasil analisis					√							

4. Penyusunan laporan										
a) Pembuatan kerangka laporan					√	√	√			
b) Pemeriksaan kerangka laporan						√	√			
c) Penulisan laporan						√	√			
d) Penilaian hasil penelitian							√			
e) Revisi hasil penelitian							√			
f) Penggadaan hasil penelitian							√			

6. Bahan Acuan Kerja.

Dalam penelitian Kajian Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Kabupaten Sumbawa ini, bahan yang menjadi acuan kerja antara lain:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Prosedur Operasional Standard Penelitian Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat;
- d. DIPA Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun 2019; dan
- e. SK Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor 0166/G5.21/KP/2019 tentang Penunjukan dan pengangkatan Tim Pengawasan dan Pengendalian

Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Kabupaten Sumbawa Tahun

Anggaran 2019.

7. Tim Peneliti dan Informan

Penelitian Kajian Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang di Kabupaten Sumbawa (Upaya Pengawasan dan Pengendalian) ini dilaksanakan oleh 2 orang peneliti, 1 orang analis data, dan 10 informan.

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	I Nyoman Cahyasabudhi Santosa	Koordinator	Kantor Bahasa NTB
2.	Lukmanul Hakim	Anggota	Kantor Bahasa NTB
3.		Analisis Data	Kantor Bahasa NTB
4.		Informan	Kab. Sumbawa
5.		Informan	Kab. Sumbawa
6.		Informan	Kab. Sumbawa
7.		Informan	Kab. Sumbawa
8.		Informan	Kab. Sumbawa
9.		Informan	Kab. Sumbawa
10.		Informan	Kab. Sumbawa
11.		Informan	Kab. Sumbawa
12.		Informan	Kab. Sumbawa
13.		Informan	Kab. Sumbawa

8. Biaya

Biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan kepada DIPA

Nomor -023.13.2.660091/2019 tanggal 5 Desember 2018 Kantor Bahasa Nusa Tenggara

Barat Tahun Anggaran 2019.